

# PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2016



Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1  
Muara Enim - Sumatera Selatan 31311  
Telp. (0734)7420107, Faks. (0734)7420108  
Website: [www.pa-muaraenim.go.id](http://www.pa-muaraenim.go.id)  
e-mail: pamuaraenim@ymail.com



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk kinerja Pengadilan Agama Muara Enim.

LKjIP Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pengadilan Agama Muara Enim diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi Pengadilan Agama Muara Enim menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah merupakan pekerjaan besar bagi jajaran Pengadilan Agama Muara Enim, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2016 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim selama tahun 2016 yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Muara Enim mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang optimal, baik



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai bentuk dari pengejawantahan prinsip transparansi dan yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Agama Muara Enim yang sudah ditetapkan yaitu "**Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung**".

Ketua

Pengadilan Agama Muara Enim

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.

NIP 19690930.199403.1.002



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	iii
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	1
<b>BAB I Pendahuluan</b>	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi	7
D. Sistematika Penyajian	8
<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>	10
A. Rencana Strategis	10
B. Tujuan Strategis	11
C. Sasaran Strategis	12
D. Indikator Kinerja Utama	13
E. Rencana Kinerja Tahun 2016	18
F. Penetapan Kinerja Tahun 2016	19
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>	22
A. Capaian Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran	50
<b>BAB IV Penutup</b>	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### Lampiran

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim
2. Matriks Rencana Strategis
3. Rencana Kinerja Tahun 2017
4. Penetapan Kinerja Tahun 2017
5. Rencana Kinerja Tahun 2018
6. Penetapan Kinerja Tahun 2018
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
nomor W6-A5/1643/OT.01.1/XII/2016



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi serta dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Dengan adanya surat tersebut di atas maka Pengadilan Agama Muara Enim sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Prabumulih untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016.

Penyusunan LKjIP intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2016 yang diukur dengan membandingkan “Rencana Kinerja” tahun 2016 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada “Rencana Strategis” Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2015-2019.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Muara Enim, telah disusun dan ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Agama Muara Enim Tahun Anggaran 2016 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 4.114.896.000,00 (*empat milyar seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Muara Enim selama tahun 2016. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada dibawah Kementerian Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamanemen dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi,



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atau. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Muara Enim merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama Muara Enim adalah menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

#### **2. Fungsi**

Berdasarkan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Muara Enim melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006).



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

- b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. **Fungsi Lainnya**
  - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006).



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Organisasi pada Pengadilan Agama Muara Enim diatur dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian terjadi perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim, terdiri dari :

1. Ketua dan Wakil Ketua
2. Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Panitera Muda, terdiri dari:
  - a. Panitera Muda Hukum
  - b. Panitera Muda Permohonan
  - c. Panitera Muda Gugatan
6. Kepala Sub Bagian, terdiri dari:
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
  - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

7. Kelompok Fungsional Kepaniteraan, terdiri dari:
  - a. Panitera Pengganti
  - b. Jurusita
  - c. Jurusita Pengganti

### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mendeskripsikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam tahun anggaran 2016, dengan bentuk sajian seperti berikut :

**RINGKASAN EKSEKUTIF**, menguraikan rangkuman atau penjelasan singkat mengenai isi dari LKjIP Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016.

**BAB I. Pendahuluan**, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Muara Enim dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain:  
a. Latar Belakang; b. Tugas Pokok dan Fungsi; c. Struktur Organisasi; dan  
d. Sistematika Penyajian.

**BAB II. Perencanaan Kinerja**, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam tahun anggaran 2016 yang berisikan antara lain: a. Rencana Strategis; b. Tujuan Strategis; c. Sasaran Strategis dan; d. IKU Pengadilan Agama Muara Enim; e. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2016; dan f. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2016.

**BAB III. Akuntabilitas kinerja**, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim yang terdiri dari: a. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016; b. Analisis Kinerja; dan c. Keuangan.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

**BAB IV. Penutup**, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim di masa yang akan datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan; b. Saran; serta Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim; 2. Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2016.



## BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai lembaga Peradilan Agama yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Prabumulih, dapat menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah wilayah hukumnya. Tahun 2016 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016-2019 yang menjadi *frame* atau *visionable* dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Agama Muara Enim, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim 2016-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

#### 1. Visi Pengadilan Agama Muara Enim

Visi adalah merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Sejalan dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan hasil reviu pada tanggal 10 September 2009, yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035 yaitu "**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**" maka Visi Pengadilan Agama Muara Enim adalah : "**Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim Yang Agung**".



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### 2. Misi Pengadilan Agama Muara Enim

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan suatu pemahaman yang kritis atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Enim berikut strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

### B. TUJUAN STRATEGIS

Sebagai wujud dalam mengimplementasikan pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan, maka perlu diuraikan dalam bentuk tujuan strategis sebagaimana termuat di dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim, sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Muara Enim mampu memenuhi butir 1 dan 2 di atas.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Dengan diformulasikannya tujuan strategis tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah mampu dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan adalah berdasarkan dari visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun isu strategis lembaga peradilan yang nampak di muka publik adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi kewenangan lembaga peradilan secara umum dan Pengadilan Agama Muara Enim secara khusus, sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Dalam rangka untuk mencapai tujuan strategis, Pengadilan Agama Muara Enim berupaya:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim agar lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Muara Enim.

### C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan dan merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Muara Enim, adalah :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*);
5. Meningkatnya kepuasan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Sehingga, Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Muara Enim dalam kurun waktu tahun 2016-2019. Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

### **D. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pengadilan Agama Muara Enim telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan telah dilakukan reviu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim nomor: W6-A5/54/KU.01/SK/I/2015 tanggal 2 Januari 2015, antara lain:

#### **1. Nama Unit Organisasi :**

Pengadilan Agama Muara Enim Kelas II

#### **2. Tugas :**

- menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **3. Fungsi :**

- Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan;
- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

- Memberikan pelayanan terhadap penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- Melaksanakan penyuluhan hukum dalam wilayah hukumnya.

### 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.	Hakim Mediasi dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan dengan total perkara yang diselesaikan.	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (UN) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (UN-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (UN-1) dikali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap di-distribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera dan Jurusitai	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di <i>website</i> dengan jumlah perkara yang tidak ditayangkan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepuatan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### E. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Rencana kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016 disusun sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2016 sebagai bentuk konsistensi yang berkesinambungan dalam mengimplementasikan rencana kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Pengadilan Agama Muara Enim, sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase mediasi yang diselesaikan.	14%
		Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan	96%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	13%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	83% 87% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%
		Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Sidang Keliling	100%
		Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

### F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi kinerja pada akhir tahun 2016. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2016 tidak terlepas dari Kebijakan Umum Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2016, adalah sebagai berikut :



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase mediasi yang diselesaikan.	14%
		Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan	96%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	13%
2.	Peningkatan aksebilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	83% 87% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%
		Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>acces to justice</i> )	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Sidang Keliling	100%
		Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Dalam menentukan target/ sasaran, Pengadilan Agama Muara Enim mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi pada kondisi riil berdasarkan kemampuan/ kapasitas optimal yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Oleh sebab itu rata-rata pencapaian target ditetapkan sebesar 100%, kecuali:

- Sasaran nomor 1. huruf a. dimana kemungkinan terjadinya keberhasilan mediasi yang dialami oleh Pengadilan Agama Muara Enim masih sangat minim sehingga hanya ditargetkan pencapaian sebesar 14% saja.
- Sasaran nomor 1. huruf f. dimana kemungkinan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Enim dapat diputuskan tidak lebih dari 6 (enam) bulan sehingga hanya ditargetkan pencapaian sebesar 13% saja.
- Sasaran nomor 2. ditargetkan pada kisaran 83% sampai dengan 100% karena meskipun peluang terjadinya upaya banding dan kasasi sedikit, namun kemungkinan itu masih dapat terjadi.



### BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi..

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), diperlukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu lembaga peradilan yang menegakkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi, dan kemanfaatan IKU, sebagai berikut:

1. Pemilihan dan Penetapan IKU:

Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur.

2. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU):

Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

3. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain: Perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/ punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.:



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	14%	7,05%	50,36%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%	100%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	96%	96,51%	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	98,86%	98,86%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	13%	1,14%	8,77%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	83% 87% 100%	99,65% 99,87% 100%	120,06% 114,79% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Sidang Keliling	100%	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdamaian yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

$$* \text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2016 secara umum Pengadilan Agama Muara Enim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2016. Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015 dengan 2016, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

### ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Muara Enim telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara tahun 2016 sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	14%	7.05%	50.36%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%	100%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	96%	96.51%	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	100%	98.86%	98.86%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	13%	1.14%	8.77%

### a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

Prosentase mediasi yang diselesaikan ditargetkan 14% dari jumlah perkara yang diterima 156 perkara perdata dan yang berhasil selesai melalui proses mediasi sebanyak 11 perkara, sehingga prosentase realisasi tahun 2016 adalah sebesar 7,05%

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Mediasi yang diselesaikan	14%	7.05%	50.36%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase mediasi yang diselesaikan adalah  $7,05/14 \times 100\% = 50,36\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 50,36% dari target yang ditetapkan 14% tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para pihak yang bersengketa bersikukuh pada dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam pelaksanaan upaya damai tidak tercapai, adapun perkara yang dicabut sebelum PHS maupun PMH ditetapkan.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara perdata sebanyak 156 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 11 perkara atau 7,05%, pada tahun 2015 perkara perdata sebanyak 188 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 6 perkara



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

atau 3,19 %, pada tahun 2014 perkara perdata sebanyak 132 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 10 perkara atau 7,58%, pada tahun 2013 perkara perdata sebanyak 199 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 12 perkara atau 6,03%, pada tahun 2012 perkara perdata sebanyak 211 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 8 perkara atau 3,79% diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Perdata	8	12	10	6	11

Adapun gambaran perbandingan hasil yang telah dicapai antara tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 ada peningkatan yang dicapai.

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ditargetkan 100% antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian sebanyak 11 perkara dan yang berhasil menjadi akta perdamaian melalui proses mediasi sebanyak 11 perkara, sehingga persentase capaian tahun 2016 adalah 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Mediasi yang menjadi Akta Perdamaian	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100% telah sesuai



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

dengan yang diinginkan mediator dalam pelaksanaan upaya mediasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk berdamai.

### c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara perdata yang masing-masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2016, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2015, yaitu sejumlah 134 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2016.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Pengadilan Agama Muara Enim telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:

No	Perkara	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Cerai Gugat	82	104	66	84	95
2.	Cerai Talak	23	35	22	28	23
3.	Perkara lainnya	9	7	6	15	16
	Jumlah	114	146	94	127	134



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

- Pada tahun 2012 sisa perkara tahun 2011 sebesar 114 perkara dapat terselesaikan 114 perkara dengan capaian 100%.
- Pada tahun 2013 sisa perkara tahun 2012 sebesar 146 perkara dapat terselesaikan 146 perkara dengan capaian 100%.
- Pada tahun 2014 sisa perkara tahun 2013 sebesar 95 perkara dapat terselesaikan 94 perkara dengan capaian 98,95%.
- Pada tahun 2015 sisa perkara tahun 2014 sebesar 127 perkara dapat terselesaikan 127 perkara dengan capaian 100%.
- Pada tahun 2016 sisa perkara tahun 2015 sebesar 134 perkara dapat terselesaikan 134 perkara dengan capaian 100%.

### d. Persentase perkara yang diselesaikan.

Persentase perkara perdata yang diselesaikan ditargetkan 96% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2016 sebanyak 3048 dan sisa tahun 2015 sebanyak 134 serta total perkara tahun 2016 menjadi 3182 dan diselesaikan di tahun 2016 sebanyak 3071 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 96,51%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan	96%	96.51%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja presentase sisa perkara yang diselesaikan adalah  $96,51/96 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 96%.

Pada tahun 2016 perkara masuk pada Pengadilan Agama Muara Enim sebanyak 3128 dan dapat diselesaikan di tahun 2016 sebanyak 3071 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### Keadaan Perkara Di Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2016

No	Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa
1	January	134	128	107	155
2	February		101	128	128
3	March		109	104	133
4	April		96	110	119
5	May		91	96	114
6	June		80	86	108
7	July		112	67	153
8	August		142	155	140
9	September		106	104	142
10	October		1252	1224	170
11	November		764	774	190
12	December		67	146	111
Jumlah		134	3048	3071	111

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:

No	Perkara	2012		2013		2014		2015		2016	
1	Cerai Gugat	621	56,56%	651	61,71%	671	61,17%	754	58.81%	807	25.36%
2	Cerai Talak	279	25,41%	245	23,22%	217	19,78%	251	19.58%	284	8.93%
3	Perkara lain	52	4,74%	64	6,07%	82	7.47%	143	11.15%	1980	62.23%
	Jumlah	952	86,70%	960	91,00%	970	88.42%	1148	89.55%	3071	96.51%

Perkara cerai gugat, cerai talak dan perkara lain yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 3.182 perkara dan diselesaikan sebanyak 3.071 perkara (96,51%), dibandingkan dengan perkara pada tahun 2015 sebanyak 1.282 perkara dan diselesaikan sebanyak 1148 perkara (89,55%), pada tahun 2014 sebanyak 1.097 perkara dan diselesaikan sebanyak 970 perkara (88,42%), pada tahun 2013 sebanyak 1.055 perkara dan diselesaikan sebanyak 960 perkara (91%), pada tahun 2012 sebanyak 1.098 perkara dan diselesaikan sebanyak 952 perkara (86,70%), ini berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara perdata sebesar 6,96% pada tahun 2016 ini.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

- e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang putus di tahun 2016 sebanyak 3.071 perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah sejumlah 3.036 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 98,86%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	98.86%	98.86%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah  $98,86/100 \times 100\% = 98,86\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 98,86% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim perkara yang diterima sebanyak 3.182 dan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan di tahun 2016 sebanyak 3.036 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara	2012		2013		2014		2015		2016	
		Diterima	Putus								
1	Cerai Gugat	732	621	717	651	755	671	849	754	884	807
2	Cerai Talak	301	279	267	245	245	217	274	251	311	284
3	Perkara lain	65	52	64	64	97	82	159	143	1987	1980
	Jumlah	1098	952	1048	960	1097	970	1282	1148	3182	3071



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

- f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan ditargetkan 13% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2016 sebanyak 3.182 perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan adalah sejumlah 35 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 8.77%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	13%	1.14%	8.77%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan adalah  $1,14/13 \times 100\% = 8.77\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 8.77% dari target yang ditetapkan 13%.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim perkara yang masuk sebanyak 3.182 dan perkara putus sebanyak 3.071 serta yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan di tahun 2016 sebanyak 35 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

N O	Jenis Perkara	2012			2013			2014			2015			2016		
		Diterima	Diputus		Diterima	Diputus		Diterima	Diputus		Diterima	Diputus		Diterima	Diputus	
			<6 Bulan	>6 Bulan												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Cerai, cerai talak dan perkara lainnya	1098	938	14	1055	946	14	1097	962	14	1282	1119	29	3048	3036	35
	Jumlah	1098	938	14	1055	946	14	1097	962	14	1282	1119	29	3048	3036	35

### 2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim

Pencapaian sasaran peningkatan aksebilitas putusan hakim pada tahun 2016 sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Peningkatan aksebilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	83	99.65	120.06

#### a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ditargetkan 83% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2016 sebanyak 3.182 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2016 adalah sejumlah 3.171 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 99,65%.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	83%	99,65%	120.06%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah  $99,65/83 \times 100\% = 120,06\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 120,06% dari target yang ditetapkan 83%.

### b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 87,0% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2016 sebanyak 3.182 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2016 adalah sejumlah 3.178 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 99,87%.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	87,0%	99,87%	114.79%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah  $99,87 / 87,0 \times 100\% = 114,79\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 114,79% dari target yang ditetapkan 87%.

### c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2016 sebanyak 3.182 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2016 adalah sejumlah 3.182 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	100%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim perkara yang masuk sebanyak 3.182 perkara dan mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 11 perkara, Kasasi sebanyak 4 perkara dan Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara dan Upaya Hukum	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Perkara Masuk	1098	1055	1097	1282	3182
B.	Upaya Hukum :					
	1. Banding	6	6	5	8	11
	2. Kasasi	4	1	2	1	4
	3. Peninjauan Kembali	-	-	-	-	-

### 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2016 sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAI AN (%)
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100	100	100
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100	100	100



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAI AN (%)
	d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)	100	100	100
	e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100	100	100

Tertib administrasi perkara awal untuk peningkatan penyelesaian perkara secara administrasi di Pengadilan Agama Muara Enim dan merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Agama Muara Enim 2015-2019. Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran:

- Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diterima 9 perkara dan yang disampaikan secara lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) sebanyak 9 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target Indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebanyak 15 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Banding	6	6	5	8	11
2.	Kasasi	4	1	2	1	4
3.	Peninjauan Kembali	-	-	-	-	-

Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK oleh Pengadilan Agama Muara Enim telah disampaikan secara lengkap atau mencapai target 100%.

### b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan 100% dari jumlah perkara 3.048 perkara dan yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis sebanyak 3.048 perkara, sehingga persentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 3.048 perkara dan yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 3.048 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Cerai Gugat	650	613	689	765	789
2.	Cerai Talak	278	232	223	246	288
3.	Perkara lain	56	64	90	144	1971
	Jumlah	984	909	1002	1155	3048

Hal ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Agama Muara Enim telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2016 semua berkas dapat didistribusikan kepada majelis.

### c. Prosentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Persentase ration majelis hakim terhadap perkara ditargetkan 100% dari jumlah 3182 perkara (perkara tahun 2016 sebanyak 3.048 dan sisa akhir tahun 2015 sebanyak 134 perkara) dan ratio majelis hakim terhadap penyelesaian perkara sebanyak 3.182 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase ratio majelis hakim terhadap perkara adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 3.182 perkara dan ratio majelis hakim terhadap penyelesaian perkara sebanyak 3.182 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Cerai Gugat	732	717	755	849	884
2.	Cerai Talak	301	267	245	274	311
3.	Perkara lain	65	71	97	159	1987
	Jumlah	1098	1055	1097	1282	3182

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon).

Percentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon) ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 3.182 perkara dan yang penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon) sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah ditargetkan 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon)	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon) adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 3.182 perkara dan penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon) sebanyak 3.182 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Cerai Gugat	732	717	755	849	849
2.	Cerai Talak	301	267	245	274	274
3.	Perkara lain	65	71	97	159	159
	Jumlah	1098	1055	1097	1282	1282

Hal ini menggambarkan bahwa penyampaian perkara telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak yang berperkara sehingga semua berkas perkara yang telah diputus.

### e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100%. Namun, pada tahun 2016 tidak terdapat perkara yang perlu pelaksanaan penyitaan tepat waktu, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 0%.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	0%	0%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat adalah  $0/100 \times 100\% = 0\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 0% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 0 perkara dan yang dilaksanakan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 0 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Keadaan Perkara	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Perkara yang dimohon sita	1	1	3	3	0
	Jumlah	1	1	3	3	0

### 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*)

Pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*) pada tahun 2016 sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAIAN (%)
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>acces to justice</i> )	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100	100	100



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAIAN (%)
	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100	100	100

Penetapan perkiraan target berdasarkan data historis perkara diselesaikan memenuhi pelaksanaan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*) telah mencapai 100%, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata tiga tingkat capaian indikator kinerja, yaitu :

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 5 perkara dan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 5 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara prodeo yang diselesaikan adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 5 perkara dan yang dilaksanakan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 5 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Keadaan Perkara	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Perkara Prodeo	2	6	3	5	5
	Jumlah	2	6	3	5	5

Hal ini menggambarkan bahwa dari seluruh perkara yang mengajukan perkara prodeo telah dapat diselesaikan dengan baik.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 77 perkara dan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling sebanyak 77 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 77 perkara dan yang dilaksanakan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 77 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

No	Keadaan Perkara	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sidang Keliling	56	41	41	46	77
	Jumlah	56	41	41	46	77

Dari 46 perkara yang di bawa ke lokasi sidang keliling seluruhnya dapat diselesaikan. Hal ini menggambarkan bahwa sidang keliling telah dilaksanakan dengan baik.

- c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 1.148 perkara dan diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebanyak 1.148 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah  $100/100 \times 100\% = 100\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebanyak 1148, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Cerai Gugat	621	651	671	754	807
2.	Cerai Talak	279	245	217	251	284
3.	Perkara lain	52	64	82	143	1980
	Jumlah	952	960	970	1148	3071

Dari 3.071 perkara tersebut dimana (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus pada Pengadilan Agama Muara Enim.

### 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2016 sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAI AN (%)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100	0	0

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100%, dari jumlah perkara sebanyak 0 perkara yang permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

dilakanakan eksekusi sebesar 0 perkara sisanya masih dalam proses penyelesaian, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 0%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah  $0/100 \times 100\% = 0\%$ , pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 0% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 0 perkara dan yang permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebanyak 0 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut:

No	Keadaan Perkara	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Permohonan Eksekusi	-	4	1	2	-
	Jumlah	-	4	1	2	-



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengawasan pada tahun 2016 sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	0	0
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100	100	100

Untuk mencapai sasaran pengawasan yang berkualitas, digunakan indikator kinerja yaitu :

#### 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100%, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2016 dan pada tahun ini tidak adanya pengaduan yang masuk ke Pengadilan Agama Muara Enim sehingga tidak adanya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 0%.

Pencapaian target indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim tidak menerima pengaduan masyarakat dan tidak ada ditindaklanjuti, diperbandingkan dengan pengaduan masyarakat di tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

No	Keadaan Pengaduan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	2	-	-	-	-
	Jumlah	2	-	-	-	-

### 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100%, dari jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan 1 kali pemeriksaan PTA Palembang dan dengan 4 sasaran pengawasan (bidang peningkatan kualitas putusan, peningkatan kualitas pemberkasan perkara, peningkatan pelayanan terpadu dan monitor penyerapan DIPA dan SIMAK BMN) dan yang ditindaklanjuti dengan 1 kali pemeriksaan dengan 4 sasaran pengawasan tersebut, sehingga prosentase capaian tahun 2016 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal PTA Palembang 1 kali pemeriksaan dan dengan 4 sasaran pengawasan, dan telah yang ditindaklanjuti 1 kali pemeriksaan dan dengan 4 sasaran pengawasan tersebut, diperbandingkan dengan temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti di tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Keadaan Pemeriksaan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	2	2	2	1	1
	Jumlah	2	2	2	1	1



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Dari 1 kali pemeriksaan eksternal yang dilakukan PTA Palembang dengan 4 sasaran pengawasan pada tahun 2016 seluruh hasil temuan pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti.

### B. REALISASI ANGGARAN

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2016 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Enim. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2016 belum Optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dapat meningkat.

Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 merupakan tahun keenam diterapkannya sistem penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*performance*



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

*base budgeting*), dan kebijakan baru RAPBN yaitu pernyataan anggaran (*unified budget*) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jumlah pagu DIPA.01 Badan Urusan Administrasi MARI Tahun Anggaran 2016 semula sebesar Rp3.925.072.000,00 dan setelah direvisi menjadi Rp4.086.646.000,00 dengan realisasi periode 31 Desember 2016 sebesar Rp4.066.644.410,00 atau sebesar 99,51% dari total anggaran dan DIPA.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp28.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.250.000,00 atau sebesar 100% dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai :

### 1. Pendapatan

#### Realisasi Pendapatan

- Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
- Tidak terdapat penerimaan perpajakan selama periode ini.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. PNBP juga berasal dari pengembalian belanja atas belanja yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- Terdapat realisasi PNBP pada tahun anggaran 2016.

Selain pendapatan pajak dan PNBP, juga terdapat pendapatan yang berasal dari hibah, namun untuk periode ini Pengadilan Agama Muara Enim tidak memiliki dana hibah.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### 2. Belanja

#### a. Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Muara Enim meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal.

Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini:

**Tabel.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran DIPA</b>	<b>Realisasi DIPA</b>	<b>Presentase</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Rupiah Murni (DIPA 01)	Rp4.086.646.000,00	Rp4.066.644.410,00	99,51%
Rupiah Murni (DIPA 04)	Rp 28.250.000,00	Rp 28.250.000,00	100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp4.114.896.000,00</b>	<b>Rp4.094.894.410,00</b>	<b>99,51%</b>



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Tabel.2

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan Program DIPA-01

Kode Jenis Belanja	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	2	3	4	5	6
51	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp 3.412.426.000	Rp 3.412.422.965	100,0%
52	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp 588.220.000	Rp 568.971.445	96,7%
53	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp 86.000.000	Rp 85.250.000	99,1%
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 4.086.646.000</b>	<b>Rp 4.066.644.410</b>	<b>99,5%</b>



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Tabel.3

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan Program DIPA-04

Kode Jenis Belanja	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	2	3	4	5	6
52	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 28.250.000	Rp 28.250.000	100.0%
<b>Jumlah</b>			Rp 28.250.000	Rp 28.250.000	100.0%

Tabel.4

Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja

Kode	Uraian Belanja	Realisasi Pengembalian
1	2	3
511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 256,00
511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 740.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 740.256,00</b>



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Tabel.5  
Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode	Uraian Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan
1	2	3
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp 659,124
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	Rp 14,645,000
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp 92,020,000
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp 34,645,800
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Lalu	Rp 18
423991	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	Rp 10,012,160
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 151,982,102</b>

b. Hambatan dan Kendala :

1. Tercapainya target realisasi anggaran Pengadilan Agama Muara Enim TA 2016 secara keseluruhan sebesar 99,51% menunjukkan tidak terdapat kendala dan hambatan berarti dalam melaksanakan pengelolaan anggaran. Namun, sistem perencanaan terutama saat penyusunan RKA-K/L yang belum terbuka mengakibatkan masih terjadinya revisi/ pergeseran pagu anggaran pada tahun berjalan sehingga sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Adanya pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan PNS sebesar Rp740.256,00 yang bersumber dari belanja gaji dan tunjangan PNS Tahun Anggaran 2016.



## BAB IV

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dalam institusi pemerintahan, pelaksanaan kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
2. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim yang merupakan wujud transparansi dan Pengadilan Agama Muara Enim dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.
3. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2016, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja (*outcome*) belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja (*outcome*) untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.
4. Pada LKjIP Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016 ini menyampaikan terjadinya reviu Indikator Kinerja Utama yang disinergikan dengan reviu Renstra Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016-2019, salah satu upaya melaksanakan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atas evaluasi LKjIP tahun 2011 dan 2012. Tahun 2016 sebagai tahun keempat Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016-2019 melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2016 serta dibandingkan dengan



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

rencana kinerja (*Performance Plan*) beberapa tahun sebelumnya dari *core bussines* (ciri khas) badan peradilan dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Muara Enim.

5. Unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Muara Enim oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai *user*) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanyaintervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud *good governance*.
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga tinggi Pengadilan Agama Muara Enim, karena Rencana Kinerja Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.
7. Pengadilan Agama Muara Enim mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen teknis, administrasi organisasi dan finansial di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan dari berbagai pihak, antara lain: masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Enim.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

8. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2016 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Agama Muara Enim sebagai Institusi Pengadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.
9. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Muara Enim akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.
10. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Pengadilan Agama Muara Enim. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di masa yang akan datang.

### B. SARAN

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Agama Muara Enim. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian.
3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah untuk menghindari jika terjadi analisis pengukuran kinerja yang ada capaian kinerja yang melebihi 100%.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai *punish and reward instrument* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Agama Muara Enim mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LKjIP, antara lain :
  - a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
  - b. mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
8. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2010 - 2014.



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

9. Capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2016 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim di masa mendatang.
10. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
11. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

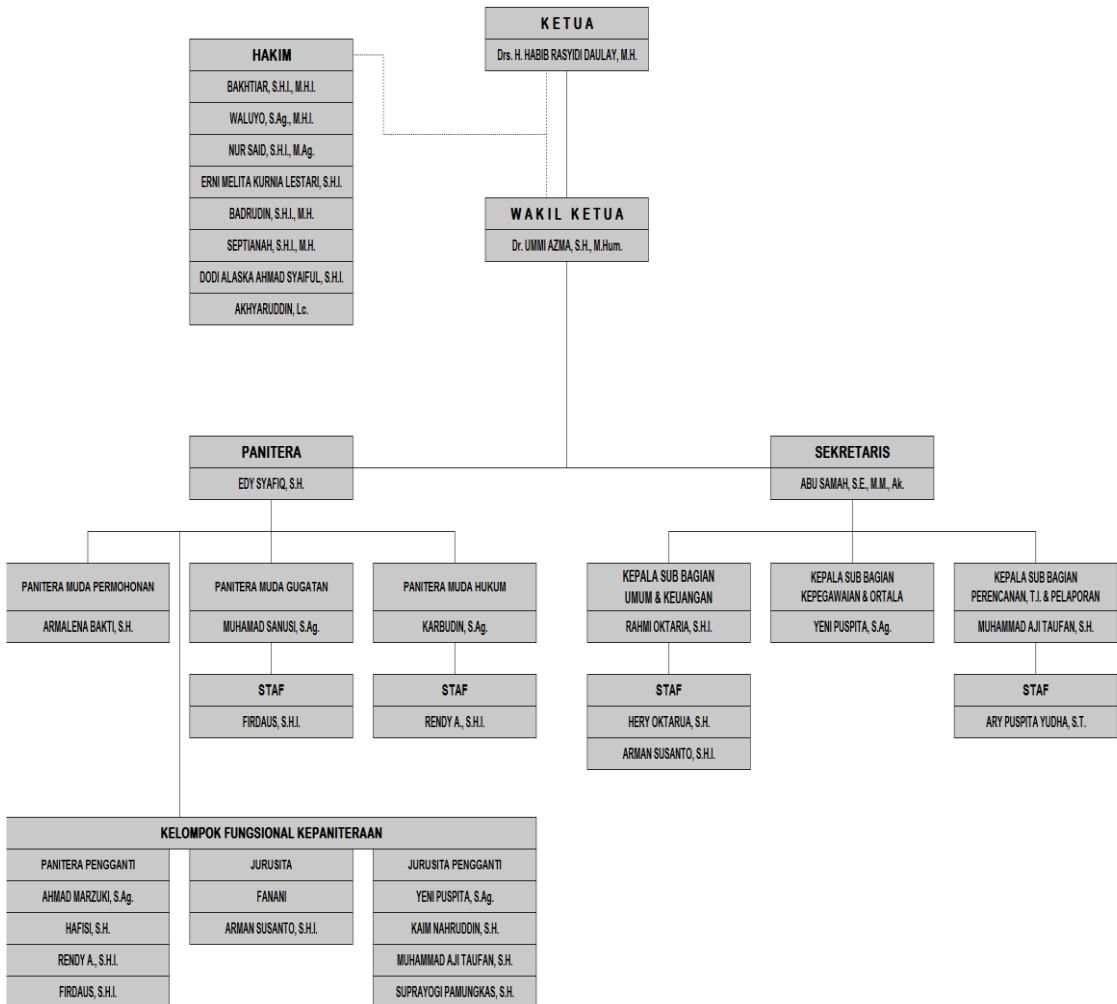


## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### Lampiran 1

### STRUKTUR ORGANISASI

### PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM





## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### Lampiran 2

### MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tujuan :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Muara Enim dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan. e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	12.5% 100% 100% 94.8% 100% 11.3%	14.5% 100% 100% 96.8% 100% 13.8%	16.5% 100% 100% 98.8% 100% 16.3%	18.5% 100% 100% 99.8% 100% 18.8%	20.5% 100% 100% 100% 100% 21.3%
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	81.8% 85% 100%	83.8% 87% 100%	85.8% 89% 100%	87.8% 91% 100%	89.8% 93% 100%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. e. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>acces to justice</i> )	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan penyelesaian perkara.	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%	100%	100%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### Lampiran 3

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. Abdurrahman Har, S.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Muara Enim

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.



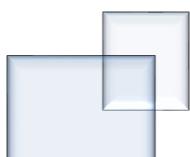
Pihak Kedua,

Drs. H. Abdurrahman Har, S.H.  
NIP. 19500817.197603.1.006

Muara Enim, 3 Januari 2017

Pihak Pertama,

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.  
NIP. 19690930.199403.1.002





## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

#### PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	16.5%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	98.8%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	16.3%
2.	Peningkatan aksebilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	85.8% 89.0% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)..	100%
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100%
		f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdamaian yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

### Kegiatan

1. DIPA 01

### Anggaran

Rp. 4.224.284.000,-

2. DIPA 04

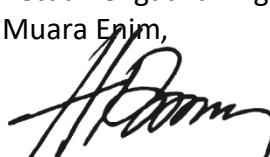
Rp. 26.750.000,-

Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Palembang,

Drs. H. Abdurrahman Har, S.H.  
NIP. 19500817.197603.1.006

Muara Enim, 03 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama  
Muara Enim,

  
Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.  
NIP. 19690930.199403.1.002



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### Lampiran 4

### RENCANA KINERJA

#### PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

TAHUN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	16.5% 100% 100% 98.8% 100% 16.3%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	85.8% 89.0% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100% 100% 100% 100% 100%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### Lampiran 5

### RENCANA KINERJA

#### PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	18.5% 100% 100% 99.8% 100% 18.8%
2.	Peningkatan aksebilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	87.8% 91.0% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100% 100% 100% 100% 100%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

### Lampiran 6



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
NOMOR: W6-A5/1643/OT.01.1/XII/2016

### TENTANG

#### PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

#### KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

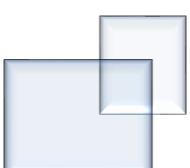
**Menimbang** : 1. Bahwa Untuk kesempurnaan dalam Penyusunan Laporan akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim perlu dibentuk Tim Penyusun  
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Perma nomor 7 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Keekretariatan Peradilan

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan Pertama** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Muara Enim;

**Kedua** : Kepada yang namanya ditunjuk dan di angkat sebagai Tim Penyusuna Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, disiplin, tertib dan tanggung jawab





## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

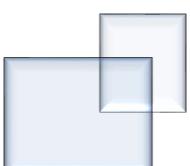
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- Keempat** : Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 6 Desember 2016

Ketua

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.  
NIP 19690930 199403 1 002

Tembusan:  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang



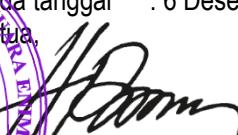


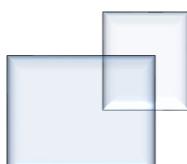
## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua  
Pengadilan Agama Muara Enim  
Nomor : W6-A5/1643/OT.01.1/XII/2016  
Tanggal : 6 Desember 2016

### PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Kegiatan
1	2	4	5
1.	Abu Samah, S.E., M.M., Ak	Sekretaris	Ketua
2.	Muhammad Aji Taufan, S.H.	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Edy Syafiq, S.H.	Panitera	Anggota
4.	Ahmad Marzuki, S.Ag.	Wakil Panitera	Anggota
5.	Karbudin, S.Ag	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Ary Puspita Yudha, ST	Staf Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 6 Desember 2016  
Ketua,  
  
Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.  
NIP 19690930 199403 1 002





## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

# LAMPIRAN

